

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

HR, Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Faisal, Sanapiah, 2005, *Format-format Penelitian Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Huda, Ni'Matul, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang.

Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.

Joeniarto, 1990, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.

Kartasapoetra, G, 1986, *Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahan*, Bina Aksara, Jakarta.

Lubis, M. Solly, 1983, *Perkembangan Garis Politik dan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung.

Mardalis, 2006, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta.

Muhjad, Hadin dan Nuswardani, Nnuk, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72, Fokusmedia, Bandung, 2012.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Sudirwo, Daeng, 1981, *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Angkasa, Bandung.

Sudirwo, Daeng, 1985, *Pembahasan Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Angkasa, Bandung.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suprihatini, Amin, 2007, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Cempaka Putih, Klaten.

Widjaja, A.W, 2001, *Pemerintah Desa/Marga*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Widjaja, A.W, 2003, *Sumber Pendapatan yang Telah Dimiliki atau Dikelola oleh Desa*, PT. Raja Grafindo Persada Bina Aksara, Jakarta.

## B. Internet

Cekli Setya Pratiwi, dkk, *Penjelasan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Hukum Administrasi Negara*, <http://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-Asas-Asas-Umum-Pemerintahan-yang-Baik-Hukum-Administrasi-Negara.pdf>, hlm. 27-28, diakses tanggal 23 Maret 2017 jam 08.54.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/wenang>, di akses 22 Juli 2017 jam 23.30.

## C. Tugas Akhir

Febri Kurniansyah, 2010, *Hubungan Kerja antara Lurah dengan Badan Permusyawaratan Desa*, Skripsi, Program Studi Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Diah Cristia Dewi, 2013, *Kedudukan dan Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Serta Tata Hubungan Antara Keduanya Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa*, Skripsi, FH UNEJ, Jember.

Muhammad Taqwa, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Fungsi BPD Di Desa Makkawaru*, Skripsi, FH UNHAS, Makassar.

Febri Dwi Saputra, 2017, *Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul*, Skripsi, FH UMY, Yogyakarta.

## D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587). Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 115).